

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH – SAPD

2024

PERBUP PEMALANG NO.52, BD. 2024/NO.52, 116 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

- Pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, diperlukan dan diselenggarakan sesuai kaidah pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD.

Sistem Akuntansi SKPD meliputi akuntansi pendapatan; akuntansi beban dan belanja; akuntansi kas dan setara kas; akuntansi piutang; akuntansi persediaan; akuntansi aset tetap; akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud; akuntansi aset lainnya; akuntansi kewajiban; serta jurnal, buku besar, dan neraca saldo SKPD.

Sistem Akuntansi SKPKD meliputi akuntansi pendapatan; beban dan belanja; pembiayaan; kas dan setara kas; investasi; dana cadangan; aset lainnya; kewajiban; jurnal, buku besar, dan neraca saldo SKPKD; penyusunan laporan keuangan SKPKD; serta laporan keuangan konsolidasian.

CATATAN:

- Jumlah halaman termasuk Lampiran.
- Mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.